



Arikel Penelitian

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi

Multy Adra Madona, Muhammad Khafid

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Gedung L2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Jawa Tengah, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 21, 19
Revised: May 2, 20
Available online: June 6, 20

KEYWORDS

Sustainability report, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan

CORRESPONDENCE

Phone: +6285729141437
E-mail: madonaadra27@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of the proportion of independent commissioners, audit committees, and managerial ownership on sustainability report disclosures with firm size as a moderating variable. The research population is mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017 as many as 41 companies, from which eight companies do not meet the criteria. The purposive sampling technique is used to produce 99 samples and analysis units. The logistic regression analysis is used as analysis tool by the aids of IBM SPSS 23.0 software. The results shows that the proportion of independent commissioners had a significant negative effect on sustainability report disclosure, while the audit committee and managerial ownership does not affect the disclosure of sustainability report. The proportion of independent commissioners moderated by firm size shows positive results that strengthened the influence of sustainability report disclosures. In addition, audit committees and managerial ownership moderated by firm size does not affect the disclosure of sustainability reports. The suggestion for future research is to pay attention to the extent of disclosure and quality of the sustainability report content by looking at disclosure indicators in accordance with the Global Reporting Initiative guidelines.

PENDAHULUAN

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya guna mengembangkan kegiatan perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan disamping menjalankan aktivitas untuk memperoleh laba setinggi mungkin juga harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada [1]. Seiring berkembangnya zaman, konsep memaksimalkan laba mulai bergeser dan berubah menjadi konsep *triple bottom line* atau 3P (*profit, people, planet*) yang dikemukakan oleh John Elkington (1994) dalam buku *Cannibal with Forks*. Elkington sendiri adalah pendiri *Sustainability*, yaitu perusahaan konsultan yang membantu perusahaan dalam mengintegrasikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bisnisnya [2].

Adanya prinsip 3P ini menjadi pilar utama perusahaan agar tidak hanya mengejar keuntungan secara finansial saja dalam berbisnis tetapi juga lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta

lingkungan sekitar. Dilling [3] memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan *profit* untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, *people* untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan masyarakat, serta *planet* untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Paradigma 3P ini dianggap sebagai pilar utama dalam membangun bisnis berkelanjutan, serta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tetapi faktanya, hampir 70% kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia disebabkan oleh perusahaan pertambangan [4]. Data mengenai menurunnya kualitas lingkungan menunjukkan sedikitnya aktivitas sepuluh perusahaan pertambangan diduga telah merusak dan mencemari sungai-sungai di Kalimantan, Jawa Timur, Papua, dan Sumatra Selatan. Lima diantaranya adalah perusahaan tambang berskala raksasa [1].

Penambangan timah dengan kapal isap produksi PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Bangka Belitung, aktivitas penambangan timah di wilayah pantai Matras berdampak pada mata pencaharian nelayan disekitar lokasi penambangan [5]. Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Indomico Mandiri di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara yang merupakan perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara (PKP2B) diduga melakukan pencemaran lingkungan atau dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa limbah abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) di sekitar PLTU PT Indomico Mandiri. Limbah ini disinyalir dibuang ditempat terbuka tanpa ada izin dan tanpa dilapisi media sehingga abu dasar akan meresap dalam tanah hingga mengotori media dalam tanah, sedangkan limbah abu terbang di tempat terbuka mengakibatkan pencemaran udara [5].

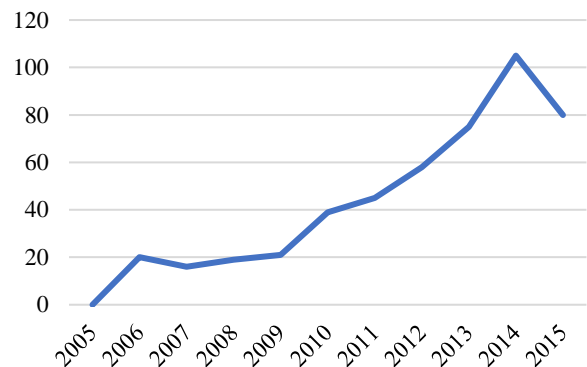
Beberapa fenomena kerusakan lingkungan tersebut menjadi bukti bahwa kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dampak lingkungan yang seperti inilah mendorong munculnya tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan di masyarakat terhadap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Informasi yang transparan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sangat diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana aktivitas perusahaan yang sebenarnya serta dampak apa saja yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Informasi tersebut dapat dilaporkan perusahaan melalui *sustainability report* (SR).

Informasi mengenai dampak aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dapat diungkapkan melalui SR sebagai laporan sukarela yang disajikan secara terpisah dari *annual report* [1]. SR merupakan sebuah laporan yang berisi tidak hanya laporan keuangan saja tetapi juga mencakup laporan terhadap aktivitas lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat memberikan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. SR adalah informasi perusahaan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan pemerintah. Namun tidak hanya melaporkan dari data yang terkumpul, SR adalah metode untuk menginternalisasi dan memperbaiki komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara yang dapat ditunjukkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal [6].

Salah satu tantangan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah adanya tuntutan akan pilihan-pilihan dan cara berfikir yang baru dan inovatif. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dituntut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membantu dalam memecahkan permasalahan terkait risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dari hubungan sosial, lingkungan, dan perekonomian, maka diperlukan sebuah kerangka konsep global, dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur sebagai sarana yang jelas dalam mengkomunikasikan mengenai keberlanjutan. Inisiatif Pelaporan Global/*Global Reporting Initiative* (GRI) berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan sebuah kerangka yang kredibel dan dapat dipercaya dalam melaporkan keberlanjutan yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya [7]. Konsep inilah yang kemudian dikenal luas sebagai laporan keberlanjutan (SR).

Laporan keberlanjutan (SR) adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. SR harus

menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik berupa kontribusi positif maupun negatif [7]. Pengungkapan SR di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary* yang berarti bahwa tidak ada aturan khusus yang mewajibkan seperti pada penerbitan laporan keuangan [8].



Gambar 1. Tren Jumlah Laporan Keberlanjutan Untuk Periode Pelaporan Tahunan 2005-2015 [9]

Pelaporan keberlanjutan (SR) di Indonesia masih bersifat sukarela dalam pengungkapkannya [10]. Berbeda dengan pelaporan seperti laporan keuangan dan laporan tahunan yang memang menjadi kewajiban perusahaan terutama perusahaan yang berstatus publik. Walaupun perkembangan pelaporan keberlanjutan sudah menunjukkan tren positif pada tahun 2005-2014. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah pelaporan keberlanjutan. Hal tersebut ada kemungkinan bahwa perusahaan belum melakukan publikasi pada situs mereka sehingga laporan mereka belum dapat diakses oleh publik [9].

Pengungkapan SR di Indonesia masih bersifat sukarela dan dalam tahapan pengenalan dimana masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan SR [11]. Peraturan yang mengatur tentang SR di Indonesia baru hadir pada tahun 2017 melalui POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun, sebenarnya pemerintah sudah mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengungkapan SR menghasilkan hasil yang inkonsisten sehingga ditemukan adanya *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh Aliniar dan Wahyuni [12] serta Novitaningrum dan Amboningtyas [13] mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Aziz [14], Aniktia dan Khafid [15], Sari dan Marsono [16] yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid [15], Widyaningsih [17], dan Widiyanto dan Prastiwi [8] menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR. Berbeda dengan hasil penelitian Idah [18], Luthfia dan Pratiwi Luthfia dan Prastiwi [19], Hasanah *et al.* [20] yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz [14] dan Widyaningsih [17] menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR, berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid [15]

serta Nurrahman dan Sudarno [21] yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR.

Melihat adanya hasil temuan yang tidak konsisten diantara beberapa penelitian sebelumnya, menjadikan hal yang menarik untuk diteliti kembali. Ketidak konsistenan pada pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR diduga disebabkan adanya variabel lain yang diduga ikut menentukan pengaruh pengungkapan SR. Penelitian ini mencoba memunculkan ukuran perusahaan sebagai variabel *moderating*. Pemilihan ukuran perusahaan sebagai moderating didasari pemikiran bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula kegiatan operasional perusahaan yang tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Semakin besar perusahaan akan semakin disorot oleh *stakeholder*, maka dari itu perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada di masyarakat. Semakin besar perusahaan akan semakin luas informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan SR [18]. Uraian tersebut menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan berfokus pada cakupan masalah dengan membatasi penggunaan variabel sehingga penelitian ini akan lebih fokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham manajerial terhadap pengungkapan SR, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Variabel proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial dipilih sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan SR yang dilatarbelakangi oleh berbagai alasan baik karena belum konsistennya hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian yang justru memberikan bukti yang berkebalikan dengan hipotesis yang telah dirumuskan maupun karena peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap pengungkapan SR perusahaan.

Penelitian ini juga mengkaji penggunaan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Atas pengaruh variabel independen dan keterlibatan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi dalam pengungkapan SR, serta terdapat beberapa teori yang kemudian dirujuk dalam penelitian ini, diantaranya teori stakeholder dan teori legitimasi. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan populasi dan periode penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian selama tiga tahun yaitu 2015-2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR dan peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan tersebut. Orisinalitas penelitian ini yaitu penambahan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Hal ini diharapkan dapat memberikan referensi, penjelasan, maupun jawaban bahwa

penyebab ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu disebabkan adanya ukuran perusahaan sebagai variabel moderating yang belum pernah diungkap pada penelitian sebelumnya.

Definisi *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi [22]. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya* dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain [23]. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut [24]. Teori legitimasi menyatakan bahwa legitimasi suatu entitas bisnis untuk beroperasi dalam masyarakat secara implisit tergantung pada kontrak sosial antara entitas bisnis dan masyarakat [25].

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait [26]. Atas dasar teori stakeholder, perusahaan akan berupaya memenuhi kebutuhan stakeholder dengan cara mengungkapkan SR. Apabila jumlah komisaris independen semakin besar, hal ini dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan [27]. Selain itu komisaris mempunyai tugas untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, memberikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*.

Merujuk pada teori *stakeholder* yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Idah [18] menyatakan bahwa perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* yang baik diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan yang bersifat sukarela sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder*. Semakin besar komposisi independensi dewan komisaris, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Penelitian yang dilakukan oleh Aliniar dan Wahyuni [12] serta Novitaningrum dan Amboningtyas [13] menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SR

Komite audit pada dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tahun 2015 pasal 1 angka 1 adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik/pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik. Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip GCG dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan.

Seringnya komite audit melakukan rapat, maka akan semakin sering para anggota komite audit bertukar pikiran dan pengetahuan mengenai keputusan yang harus diambil demi kepentingan seluruh *stakeholder* salah satunya keputusan mengenai pengungkapan sosial perusahaan. Semakin berkualitas komite audit, maka mereka akan semakin dapat memahami makna strategis dari pengungkapan informasi dan apa yang dibutuhkan *stakeholder* secara luas. Oleh karena itu, melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan SR sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto dan Prastiwi [8], Aniktia dan Khafid [15], serta Widyaningsih [17] menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari persentase jumlah saham manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial yang semakin besar dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham termasuk dirinya sendiri. Dalam sebuah perusahaan apabila di dalamnya ada kepemilikan manajerial, maka diprediksikan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi publik.

Jika pimpinan tim manajemen ada yang sebagai pemegang saham maka diprediksikan akan memiliki kesadaran yang cukup untuk melaksanakan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, sosial dan *corporate governance* dalam *sustainability report*. Semakin besar kepemilikan manajemen pada suatu perusahaan, maka kinerja manajemen akan semakin lebih baik terhadap perusahaan karena akan berdampak pada pemegang saham yaitu dirinya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz [14] dan Widyaningsih [17] menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR

Idah [18] menyatakan bahwa perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* yang baik diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan yang bersifat sukarela sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder*. Salah satu komponen dari *good corporate governance* adalah komisaris independen. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan salah satunya dengan pengungkapan *sustainability report*.

Merujuk pada teori legitimasi, ukuran perusahaan diduga juga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan yang turut menentukan tingkat kepercayaan investor, membutuhkan kredibilitas yang baik sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar [28]. Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset dapat menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan. Adanya peningkatan total aset perusahaan menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan juga meningkat. Akibatnya perusahaan akan dapat lebih banyak berkontribusi pada kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan akan semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan SR.

Pengawasan komite audit mendorong pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif. Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diprosikan dengan total aset. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki kreditur yang lebih banyak dan investor yang lebih banyak (baik investor lokal maupun asing) dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar perusahaan tentunya juga memiliki kegiatan operasional perusahaan yang semakin besar pula begitu juga dengan tujuan perusahaan akan semakin besar.

Besarnya suatu perusahaan cenderung akan mengakibatkan komisaris lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas laporan perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial, mengingat bahwa perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi para pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat [1]. Komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka

memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan SR.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen sebuah perusahaan apabila di dalamnya ada kepemilikan manajerial, maka diprediksikan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi publik. Jika pimpinan tim manajemen ada yang sebagai pemegang saham maka diprediksikan akan memiliki kesadaran yang cukup untuk melaksanakan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, sosial dan *corporate governance* dalam *sustainability report*. Semakin besar kepemilikan manajemen pada suatu perusahaan, maka kinerja manajemen akan semakin lebih baik terhadap perusahaan karena akan berdampak pada pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui total aset. Semakin besar perusahaan tentunya juga mempunyai banyak investor yang menanam saham pada perusahaan tersebut, salah satunya kepemilikan saham yang dimiliki manajemen juga semakin besar. Semakin besarnya kepemilikan manajemen akan mendorong para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan (*profit*). Besarnya laba perusahaan akan mempengaruhi pembagian deviden kepada pemegang saham yang tidak lain adalah para manajer, selain itu para manajer juga mendapatkan bonus apabila *profit* perusahaan semakin besar. Sehingga manajemen pun akan lebih memperhatikan jangka panjang perusahaan, salah satunya dengan mengungkapkan *sustainability report* untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

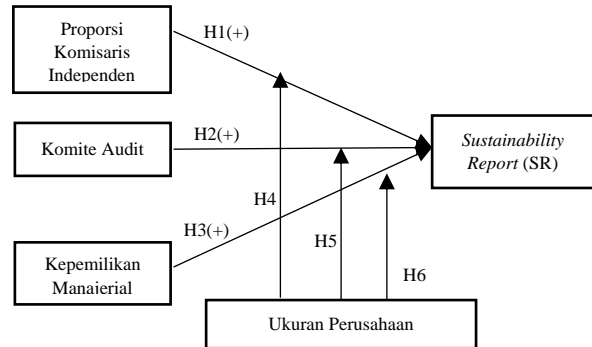
H₆: Ukuran perusahaan memoderasi kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) untuk mengetahui variabel independen yaitu *good corporate governance* diantaranya ada proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan serta laporan keberlanjutan (*sustainability report*) untuk mengetahui informasi mengenai variabel dependen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 yaitu sebanyak 41 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 33 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan sehingga diperoleh 99 unit analisis. Kriteria Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun penjelasan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Melanggar Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.	-	41
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> selama tahun 2015-2017	(8)	33
	Tahun amatan		3
	Jumlah unit analisis		33 x 3
	Total unit analisis selama periode penelitian 2015-2017		99

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis data laporan keuangan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik (*logistic regression*) dengan bantuan SPSS 23. Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik (*logistic regression*) adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi (SR). Asumsi *normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (*logistic regression*) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Rata-rata digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi dan diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel.

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (SR)	Alat untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang melaporkan kinerjanya dalam tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan [1].	Nilai 1 = mengungkapkan SR Nilai 0 = tidak mengungkapkan SR [15]
2.	Proporsi komisaris independen	Merupakan rasio antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap total Dewan Komisaris perusahaan.	Jumlah komisaris independen/Jumlah seluruh dewan komisaris x 100% [15].
3.	Komite audit	Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (POJK 55/2015).	Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun [15].
4.	Kepemilikan manajerial	Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola [15].	Jumlah saham beredar/Total saham beredar x 100% [15].
5.	Ukuran perusahaan	Ukuran yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ada 3 kategori perusahaan yaitu perusahaan besar (<i>large firm</i>), perusahaan menengah (<i>medium size</i>), perusahaan kecil (<i>small firm</i>).	$SIZE = \ln Total Assets$ [14], total penjualan ($\ln Total Revenues$), jumlah karyawan ($\ln Total Employees$) [16]

Pada variabel *dummy* analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif frekuensi, yaitu analisis statistik deskripsi yang menggambarkan data dalam bentuk kuantitatif yang tidak menyertakan pengambilan keputusan melalui hipotesis. Statistik deskriptif frekuensi digunakan untuk mengetahui distribusi respon dari setiap responden (setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, dan sebagainya). Dalam penelitian ini statistik deskriptif frekuensi digunakan untuk melihat gambaran dari variabel SR. Selain itu, didalam analisis statistik deskriptif juga dijelaskan kelas interval dari masing-masing variabel penelitian.

HASIL

Hasil analisis statistik deskriptif untuk proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *sustainability report* dapat dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
SR	99	0,000	1,000	0,172	0,379
PKI	99	0,000	0,750	0,404	0,102
KA	99	0,000	61,000	9,717	10,771
KSM	99	0,000	9,602	1,307	2,518
SIZE	99	19,251	31,020	22,517	1,571
Valid N (listwise)	99				

Pengungkapan SR

Variabel terikat pengungkapan SR merupakan variabel *dummy* yang bernilai 0 apabila perusahaan tidak mengungkapkan SR dan bernilai 1 apabila perusahaan mengungkapkan SR. Dalam penelitian ini variabel terikat merupakan variabel *dummy* sehingga tidak dapat ditentukan nilai minimum, maksimum, rata-rata, maupun standar deviasinya. Hasil analisis *frequency* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Analisis Kelas Frekuensi Variabel Pengungkapan SR

Gambar 2 menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang mengungkapkan SR sebanyak 17 perusahaan atau 17,2% sedangkan perusahaan yang tidak mengungkapkan SR sebanyak 82 perusahaan atau 82,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit perusahaan pertambangan yang mengungkapkan SR sebagai bentuk laporan sukarela yang terpisah dari laporan tahunan.

Proporsi Komisaris Independen

Variabel proporsi komisaris independen dari sampel perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah proporsi komisaris independen terendah (minimum) adalah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) tahun 2016 sebesar 0%. Proporsi komisaris independen berjumlah 0 (tidak ada) pada laporan tata kelola perusahaan BUMI tahun 2016. Sedangkan tertinggi (maksimum) adalah PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) tahun 2015 sebesar 75%. Proporsi komisaris independen berjumlah 3 orang dari total dewan komisaris sebanyak 4 orang. Variabel proporsi komisaris independen pada 99 unit analisis data dari 33 perusahaan pertambangan yang menjadi sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 40,384. Nilai ini lebih besar daripada standar deviasinya yang hanya sebesar 10,189. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data untuk variabel proporsi komisaris independen pada perusahaan sampel tidak jauh berbeda atau hampir sama.

Komite Audit

Variabel ini diukur menggunakan rasio komite audit yang diperoleh dari jumlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan dalam setahun. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui nilai terendah (minimum) dari variabel komite audit adalah 0, yaitu PT Energy Mega Persada Tbk. tahun 2016, PT Bumi Resources Tbk. tahun 2016, PT J Resources Asia Pasific Tbk. tahun 2015-2017, PT Mitra Investindo Tbk. tahun 2015-2017. Nilai tertinggi (maksimum) dari variabel komite audit adalah 61 yaitu PT Timah (Persero) Tbk. tahun 2015. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 9,717. Nilai standar deviasi lebih besar yaitu 10,771 menunjukkan bahwa komite audit memiliki data yang bervariasi.

Kepemilikan Manajerial

Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan cara menjumlahkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibagi dengan total saham beredar. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui nilai terendah (minimum) dari variabel kepemilikan manajerial adalah 0 yaitu PT Bumi Resources Tbk. tahun 2015-2017, PT Darma Henwa Tbk. tahun 2015-2017, PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun 2015, PT Samindo Resources Tbk. tahun 2015-2017, PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. tahun 2016, PT Petrosea Tbk. tahun 2015-2017, PT Golden Eagle Energy Tbk. tahun 2015-2017, PT Elnusa Tbk. tahun 2015, PT Energy Mega Persada Tbk. tahun 2015-2017, PT Medco Energy International Tbk. tahun 2015-2017, PT Radiant Utama Interinsco Tbk. tahun 2015-2017, PT Cita Mineral Investindo Tbk. tahun 2015-2017, PT Central Omega Resource Tbk. tahun 2015-2016, PT Vale Indonesia Tbk. tahun 2015-2017, dan PT J Resources Asia Pasific Tbk. tahun 2015-2017. Nilai tertinggi (maksimum) dari variabel kepemilikan manajerial adalah 9,602 yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. tahun 2016. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 1,307, nilai ini lebih kecil dari standar deviasi yaitu 2,518 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki data yang bervariasi.

Size (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. ($SIZE = \log \text{ of total aset}$). Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui nilai terendah (minimum) dari variabel *size* adalah 19,251 dimiliki oleh PT Mitra Investindo Tbk. tahun 2016. Nilai tertinggi dari variabel *size* adalah 31,020 dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk. tahun 2017. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 22,517 dengan standar deviasi yaitu 1,571.

Menilai kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Chi-square sebesar 11,787 dengan nilai signifikansi yang diperoleh 0,161. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima, yang berarti model cocok dengan data observasinya dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai observasinya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Menilai keseluruhan model (*overall model fit*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hasil -2 Log Likelihood akhir adalah sebesar 59,422. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai dari -2LL awal ke -2LL akhir sebesar 31,381. Penurunan

nilai -2LL tersebut menunjukkan model regresi penelitian ini adalah baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Koefisien determinasi menunjukkan nilai *Cox and Snell R Square* sebesar 0,272 dan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,452. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 45,2 %, sedangkan sisanya sebesar 54,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Ringkasan hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Keterangan	B	Sig.	Hasil
H1	Proporsi Komisaris Independen (+) terhadap SR	-107,816	0,001	Ditolak
H2	Komite Audit (+) terhadap SR	0,872	0,114	Ditolak
H3	Kepemilikan Manajerial (+) terhadap SR	1,173	0,647	Ditolak
H4	Ukuran Perusahaan memoderasi Proporsi Komisaris Independen terhadap SR	3,981	0,003	Diterima
H5	Ukuran Perusahaan memoderasi Komite Audit terhadap SR	-0,380	0,109	Ditolak
H6	Ukuran Perusahaan memoderasi Kepemilikan Manajerial terhadap SR	-0,044	0,690	Ditolak

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, maka uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Variabel proporsi komisaris independen berdasarkan tabel 4.12 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai konstanta sebesar -107,816. Nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,050 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR. Nilai konstantanya adalah negatif yang menunjukkan adanya pengaruh negatif diantara proporsi komisaris independen dan pengungkapan SR. Hal tersebut menunjukkan bahwa artinya, semakin tinggi jumlah proporsi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan dalam mengungkapkan SR. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 penelitian ini **ditolak**.
2. Variabel komite audit berdasarkan Tabel 4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,114 dan nilai konstanta sebesar 0,872. Nilai signifikansinya lebih besar dari 0,050 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR Nilai konstantanya adalah positif yang menunjukkan adanya pengaruh positif diantara komite audit dan pengungkapan SR. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 penelitian ini **ditolak**.

3. Variabel kepemilikan manajerial berdasarkan Tabel 4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,647 dan nilai konstanta sebesar 1,173. Nilai signifikansinya lebih besar dari 0,050 sehingga diinterpretasikan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR. Nilai konstantanya adalah positif yang menunjukkan adanya pengaruh positif diantara kepemilikan manajerial dan pengungkapan SR. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 penelitian ini **ditolak**.
4. Interaksi antara variabel proporsi komisaris independen dengan *size* berdasarkan Tabel 4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari *alpha* (0,050), hal tersebut menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh antara proporsi komisaris independen dan SR. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar 3,981 hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel *moderating* mempunyai hubungan positif yaitu memperkuat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan SR. Artinya semakin banyak proporsi komisaris independen yang didukung oleh perusahaan yang besar, maka perusahaan akan mengungkapkan SR. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki proporsi komisaris independen yang sedikit dan perusahaan yang kecil, maka perusahaan tidak akan mengungkapkan SR. Maka dapat disimpulkan H4 penelitian ini **diterima**.
5. Interaksi antara variabel proporsi komisaris independen dengan *firm size* berdasarkan Tabel 4 memiliki nilai koefisiensi sebesar -0,380. Nilai ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel *moderating* memperlemah pengaruh komite audit terhadap pengungkapan SR. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat rapat komite audit yang tinggi dan ukuran perusahaan yang besar maka kemungkinan perusahaan mengungkapkan SR semakin kecil. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat rapat komite audit yang rendah dan ukuran perusahaan yang kecil akan mengungkapkan SR. Namun, disisi lain nilai signifikansi yang dimiliki adalah sebesar 0,109 lebih besar dari *alpha* 0,050 sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan SR. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 dalam penelitian ini **ditolak**.
6. Interaksi antara variabel kepemilikan manajerial dengan *firm size* berdasarkan Tabel 4 memiliki nilai koefisiensi sebesar -0,044. Nilai ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel *moderating* tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi dan ukuran perusahaan yang besar maka kemungkinan perusahaan mengungkapkan SR semakin kecil. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang rendah dan ukuran perusahaan yang kecil akan mengungkapkan SR. Namun, disisi lain nilai signifikansi yang dimiliki adalah sebesar 0,690 lebih besar dari *alpha* 0,050 sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR. Kesimpulan H6 dalam penelitian ini **ditolak**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan SR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan SR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan harus dapat memenuhi harapan dan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk dalam penyediaan informasi yaitu SR. Perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* tentunya akan memiliki kemungkinan yang besar untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk kepentingan *stakeholdernya* [15]. Hal ini disebabkan karena kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan dari pada pemangku kepentingan [29]. Hasil statistik deskriptif menunjukkan 89,90% perusahaan sampel telah membentuk komisaris independen sesuai dengan peraturan yaitu perusahaan harus memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Artinya, bahwa perusahaan yang telah membentuk komisaris independen sesuai dengan ketentuan belum tentu dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan SR. Aniktia dan Khafid [15] menyatakan bahwa komisaris independen belum menganggap pentingnya mengenai ada atau tidaknya pengungkapan SR. Selain itu menurut Strandberg [30] kompetensi dewan komisaris memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, sehingga bukan hanya komposisi dewan komisaris independen yang dipertimbangkan, namun juga kemampuan (*skill*), pengetahuan, latar belakang dan kompetensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat dewan komisaris.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan SR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder*, semakin berkualitas komite audit, maka mereka akan semakin dapat memahami makna strategis dari pengungkapan informasi dan apa yang dibutuhkan *stakeholder* secara luas. Oleh karena itu, melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan SR sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* diartikan bahwa sering atau tidaknya komite audit melakukan rapat pada perusahaan tidak selalu menjadi tolak ukur pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa 57,58% perusahaan sampel pada kategori tinggi, yaitu perusahaan-perusahaan melakukan rapat komite audit rata-rata 40-61 kali dalam setahun.

Berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) salah satu tujuan utama komite audit adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu komite audit lebih fokus dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dibanding kualitas pelaporan SR. Hal ini terjadi dimungkinkan karena rapat yang dilakukan kurang efektif dan mengesampingkan pengungkapan informasi sosial [31]. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian sebelumnya [4,22,25,27,29]. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan SR.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan SR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 81,82% perusahaan sampel berada pada kategori rendah, yaitu pihak manajemen cenderung tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut, tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR dimungkinkan karena masih banyak manajemen perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan saham atas perusahaan yang dikelola atau memiliki saham namun kecil. Menurut Nurrahman dan Sudarno [21], kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan SR. Hal ini mencerminkan bahwa kepemilikan manajerial yang relatif kecil menjadikan penghalang bagi manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan SR.

Manajemen yang memiliki saham diperusahaan tidak menjamin perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*, karena beberapa manajer memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Manajer ada yang berpandangan bahwa dengan pengungkapan *sustainability report* memberikan prospek yang bagus bagi perusahaan dimasa yang akan datang, sedangkan manajer lain juga berpandangan bahwa pengungkapan *sustainability report* itu tidak perlu karena tidak ada undang-undang yang mewajibkan laporan pengungkapan tersebut, serta tidak efisien dari segi biaya karena dapat mengurangi laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurrahman dan Sudarno [21] dan Aniktia dan Khafid [15].

Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan SR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan SR. Hasil ini mendukung teori legitimasi yang menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dapat diterima oleh pihak luar salah satunya masyarakat dengan cara sah. Maka, perusahaan yang besar akan cenderung memberikan informasi yang lebih banyak pula, salah satunya dengan mengungkapkan informasi *sustainability report* untuk memperoleh legitimasi masyarakat. Temuan ini memberikan makna bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset dapat menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan. Adanya peningkatan total aset perusahaan menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan juga meningkat. Akibatnya perusahaan akan dapat lebih banyak berkontribusi pada kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan akan semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam SR.

Selain itu, makin besar ukuran perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan akan semakin kompleks dan tujuan perusahaan otomatis juga akan semakin besar. Komisaris independen mempunyai wewenang dan turut andil dalam menetapkan kewajiban untuk mencapai target dan tujuan tersebut salah satunya dengan pengungkapan *sustainability report*. Prospek perusahaan kedepan akan semakin bagus, dapat lebih dipercaya oleh investor dalam dan luar negeri, serta masyarakat umum percaya bahwa perusahaan tersebut mempunyai tanggung jawab sosial yang nantinya juga akan menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Komite Audit terhadap Pengungkapan SR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan SR. Hal ini diduga karena ukuran perusahaan bukan satu-satunya faktor yang dapat dijadikan tolak ukur perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*. Semakin besar ukuran perusahaan maka volume operasional perusahaan akan semakin besar seperti kegiatan proses produksi, pemasaran, penggajian, dan pengembangan perusahaan, sehingga jumlah rapat komite audit semakin sering dilakukan karena semakin bertambahnya tanggung jawab komite audit terhadap perusahaan. Adanya wewenang tersebut maka komite audit akan lebih fokus pada pembahasan laporan keuangan daripada pengungkapan *sustainability report*, karena mengingat tujuan utama dibentuknya komite audit adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah didalam cakupan tanggung jawabnya.

Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan SR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap SR. Hal ini diduga karena ukuran perusahaan bukan satu-satunya faktor yang dapat dijadikan tolak ukur perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*. Semakin besarnya ukuran perusahaan tidak menjamin bahwa manajemen memiliki saham yang besar juga karena kemungkinan lebih banyak saham yang dimiliki oleh investor luar. Sehingga tidak semua manajemen memiliki saham dari perusahaan yang dikelola atau manajemen memiliki saham pada perusahaan tetapi jumlahnya kecil. Menurut Nurrahman dan Sudarno [21], kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan SR.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan SR, sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Proporsi komisaris independen yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan SR, namun ukuran perusahaan tidak berhasil memoderasi pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan SR pada perusahaan pertambangan di Indonesia masih sangat rendah yaitu sebesar 17,2%. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti

menggunakan variabel *dummy* yang hanya melihat perusahaan mengungkapkan SR atau tidak. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat memperhatikan luas pengungkapan serta kualitas dari isi SR dengan melihat indikator-indikator pengungkapan yang sesuai dengan Pedoman *Sustainability Report GRI*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Khafid and Mulyaningsih, "Kontribusi Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability Report," *J. Ekon. dan Keuang.*, vol. 19, no. 3, pp. 340–359, 2018. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i3.1772>.
- [2] Ressi Putri Avicenia, "Analisa Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada Program Corporate Social Responsibility sebagai Bagian dari Strategi Hubungan Masyarakat Perusahaan," 2014.
- [3] P. Dilling, "Sustainability Reporting In A Global Context: What Are The Characteristics Of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports An Empirical Analysis," no. March, 2014.
- [4] E. D. Messwati, "70 Persen Kerusakan Lingkungan Akibat Operasi Tambang," *Kompas.com*, 2012. .
- [5] T. Apriando, "Situs Berita Lingkungan," www.mongabay.co.id, 2018. .
- [6] A. Mustolih, "Panduan Bisnis Berkelanjutan," *MajalahCSR.id*, 2017. .
- [7] GRI, "Global reporting initiative," 2006.
- [8] H. S. Widianto and A. Prastiwi, "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, dan corporate governance terhadap praktik pengungkapan sustainability report," Universitas Diponegoro, 2011.
- [9] Fariz Habib, "Perkembangan laporan keberlanjutan di Indonesia," 2016. .
- [10] C. O. Ningsyh, Y. Darmayanti, and P. Fauziati, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report," Padang, 2014.
- [11] F. Adhipradana and Daljono, "Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report," *Diponegoro J. Account.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2014.
- [12] D. Aliniar and S. Wahyuni, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report," *kompertemen*, vol. XV, no. 1, pp. 26–41, 2017.
- [13] F. Novitaningrum and D. Amboningtyas, "Analysis of Good Corporate Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, and Audit Committee) To Disclosure Sustainability Report Through Roa As Moderating Variables," *Univ. Pandanaran Semarang*, pp. 0–14, 2017.
- [14] A. Aziz, "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report," *J. Audit dan Akunt. Fak. Ekon. Univ. tanjungpura*, vol. 3, no. 2, pp. 65–84, 2014.
- [15] R. Aniktia and M. Khafid, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Sustainability Report," *Account. Anal. J.*, vol. 4, no. 3, 2015.
- [16] M. P. Y. Sari and Marsono, "Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report," vol. 2, no. 2011, pp. 1–10, 2013.
- [17] D. Widyaningsih, "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 19, no. 1, pp. 38–52, 2018. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.196>.
- [18] Idah, "Corporate governance dan karakteristik perusahaan dalam pengungkapan sustainability report," *Account. Anal. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 314–322, 2013.
- [19] K. Luthfia and A. Prastiwi, "Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability," Universitas Diponegoro, 2012.
- [20] N. Hasanah, D. Syam, and A. W. Jati, "Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan di Indonesia," *J. Reviu Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 1, pp. 711–720, 2015. <https://doi.org/10.22219/jrak.v5i1.4992>.
- [21] A. Nurrahman and S. Sudarno, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report," *Diponegoro J. Account.*, vol. 2, pp. 273–285, 2013.
- [22] R. E. Freeman and J. McVea, A stakeholder approach to strategic management. *The Blackwell handbook of strategic management*, 2001. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>.
- [23] A. Chariri and I. Ghozali, *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- [24] J. Dowling and J. Pfeffer, "Organizational Legitimacy : Social Values and Organizational Behavior," *Pacific Sociol. Rev.*, vol. 18, no. 1, pp. 122–136, 1975. <https://doi.org/10.2307/1388226>.
- [25] F. Faisal, G. Tower, and R. Rusmin, "Legitimising Corporate Sustainability Reporting Throughout the World," *Australas. Accounting, Bus. Financ. J.*, vol. 6, no. 2, pp. 19–34, 2012.
- [26] Susiana and A. Herawaty, "Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap integritas Laporan Keuangan," in *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*, 2007, pp. 1–31.
- [27] R. M. Haniffa and T. E. Cooke, "Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations," *Abacus*, vol. 38, no. 3, pp. 317–349, 2002. <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>.
- [28] N. D. Utari, "Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan LQ45 yang terdaftar," 2008.
- [29] C. M. Doktoralina, D. Anggraini, and S. Melzatia, "The Importance Of Sustainability Reports In Non-Financial Companies," *J. Akunt.*, vol. XXII, no. 3, pp. 368–384, 2018. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.394>.

- [30] C. Strandberg, "The convergence of corporate governance and corporate social responsibility," Burnab, BC, 2005.
- [31] Y. Ratnasari and A. Prastiwi, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report," Universitas Diponegoro, 2010.